



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 409 /TAHUN 2022

TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Banyumas sehingga diketahui jumlah dan jenis jabatan pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 85);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka
Keputusan Bupati Banyumas Nomor
061/1078/Tahun 2020 tentang Kebutuhan Jumlah
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Banyumas dalam Jabatan Fungsional di Pemerintah
Kabupaten Banyumas dan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 061/1079/Tahun 2020 tentang
Kebutuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Banyumas dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi di Pemerintah
Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 JUL 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 060 / 409 /TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBUTUHAN JUMLAH DAN
 JENIS JABATAN APARATUR SIPIL
 NEGARA PADA SEKRETARIAT
 DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
 KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
 KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	JPT Pratama	1
2.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	JPT Pratama	1
3.	Staf Ahli Bidang Hukum	JPT Pratama	1
4.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	JPT Pratama	1
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	JPT Pratama	1
6.	Analisis Hukum - Ahli Madya	Fungsional	1
7.	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	Fungsional	3
8.	Penyuluh Hukum - Ahli Madya	Fungsional	1
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan - Ahli Madya	Fungsional	1
10.	Kepala Bagian Pemerintahan	Administrator	1
11.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Pelaksana	3
12.	Analisis Kerja Sama	Pelaksana	1
13.	Analisis Desa dan Kelurahan	Pelaksana	2
14.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	3
15.	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	Fungsional	3
16.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Administrator	1
17.	Analisis Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	6
18.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	3
19.	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	Fungsional	3
20.	Kepala Bagian Hukum	Administrator	1

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksana	2
22.	Analisis Advokasi Hukum	Pelaksana	2
23.	Analisis Produk Hukum	Pelaksana	1
24.	Pengolah Data Informasi dan Hukum	Pelaksana	2
25.	Pranata Kearsipan	Pelaksana	2
26.	Analisis Hukum - Ahli Muda	Fungsional	2
27.	Analisis Hukum - Ahli Pertama	Fungsional	2
28.	Arsiparis - Ahli Muda	Fungsional	1
29.	Arsiparis - Ahli Pertama	Fungsional	1
30.	Penyuluh Hukum - Ahli Muda	Fungsional	1
31.	Penyuluh Hukum - Ahli Pertama	Fungsional	1
32.	Perancang Peraturan Perundang-undangan - Ahli Muda	Fungsional	2
33.	Perancang Peraturan Perundang-undangan - Ahli Pertama	Fungsional	1
34.	Pranata Komputer - Penyelia	Fungsional	1
35.	Pranata Komputer - Mahir	Fungsional	1
36.	Pustakawan - Ahli Muda	Fungsional	1
37.	Pustakawan - Ahli Pertama	Fungsional	1
38.	Asisten Perekonomi dan Pembangunan	JPT Pratama	1
39.	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	Fungsional	2
40.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Madya	Fungsional	3
41.	Perencana - Ahli Madya	Fungsional	1
42.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Administrator	1
43.	Analisis Perekonomian	Pelaksana	4
44.	Penelaah Perkembangan BUMD	Pelaksana	2
45.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	4
46.	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	Fungsional	2
47.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Administrator	1
48.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	2
49.	Analisis Pembangunan	Pelaksana	2
50.	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana	2
51.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	2
52.	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	Fungsional	2

(1)	(2)	(3)	(4)
53.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
54.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
55.	Kepala Bagian Layananan Pengadaan Barang/Jasa	Administrator	1
56.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pengawas	1
57.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	2
58.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Muda	Fungsional	6
59.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Pertama	Fungsional	4
60.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengawas	1
61.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	1
62.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksana	1
63.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Muda	Fungsional	2
64.	Pranata Komputer - Penyelia	Fungsional	1
65.	Pranata Komputer - Mahir	Fungsional	1
66.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengawas	1
67.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	1
68.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Muda	Fungsional	2
69.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Pertama	Fungsional	1
70.	Asisten Administrasi Umum	JPT Pratama	1
71.	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	Fungsional	2
72.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Madya	Fungsional	2
73.	Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Madya	Fungsional	1
74.	Kepala Bagian Organisasi	Administrator	1
75.	Analisis Kelembagaan	Pelaksana	2
76.	Analisis Tata Laksana	Pelaksana	1
77.	Analisis Pelayanan Publik	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
78.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Pelaksana	2
79.	Pengelola Akuntabilitas	Pelaksana	2
80.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	2
81.	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	Fungsional	3
82.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Muda	Fungsional	2
83.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Pertama	Fungsional	2
84.	Kepala Bagian Umum	Administrator	1
85.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Pengawas	1
86.	Analisis Tata Usaha	Pelaksana	7
87.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	4
88.	Pengadministrasian Persuratan	Pelaksana	1
89.	Pranata Jamuan	Pelaksana	6
90.	Pengadministrasian Umum	Pelaksana	18
91.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Muda	Fungsional	1
92.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Pertama	Fungsional	1
93.	Arsiparis - Terampil	Fungsional	2
94.	Pranata Komputer - Terampil	Fungsional	1
95.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
96.	Bendahara	Pelaksana	1
97.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
98.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	2
99.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
100.	Pengadministrasian Keuangan	Pelaksana	1
101.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pengawas	1
102.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pelaksana	4
103.	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	Pelaksana	2
104.	Pengelola Rumah Tangga	Pelaksana	2
105.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	3
106.	Pengelola Bangunan Gedung	Pelaksana	2
107.	Pengelola Kendaraan	Pelaksana	2

(1)	(2)	(3)	(4)
108.	Pengelola Kebutuhan Logistik	Pelaksana	2
109.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	2
110.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Pelaksana	2
111.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1
112.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	2
113.	Pengemudi VIP	Pelaksana	5
114.	Pengemudi	Pelaksana	10
115.	Petugas Keamanan	Pelaksana	6
116.	Penjaga Asrama	Pelaksana	2
117.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	14
118.	Pramu Bakti	Pelaksana	3
119.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Administrator	1
120.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	Pelaksana	1
121.	Analisis Berita	Pelaksana	3
122.	Analisis Publikasi	Pelaksana	1
123.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Pelaksana	2
124.	Penyusun Naskah	Pelaksana	3
125.	Analisis Konten Media Sosial	Pelaksana	1
126.	Pranata Fotografi	Pelaksana	3
127.	Penata Liputan	Pelaksana	1
128.	Pengolah Konten Media Sosial	Pelaksana	1
129.	Pengelola Layanan Kehumasan	Pelaksana	1
130.	Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Muda	Fungsional	2
131.	Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama	Fungsional	2
132.	Kepala Sub Bagian Protokol	Pengawas	1
133.	Analisis Protokol	Pelaksana	3
134.	Analisis Pelayanan	Pelaksana	2
135.	Ajudan	Pelaksana	8
136.	Petugas Protokol	Pelaksana	7

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN